



Perkara Korupsi Di Tengah Perubahan Sosial Menggunakan Teori Anomie

Muharram Satrio Wibisono

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

muharramsatrio@gmail.com

Abstrak

Korupsi adalah salah satu dari banyak masalah yang belum terselesaikan yang secara kritis menghambat pembangunan. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corrumpo* yang berarti menjadi 'busuk', 'hancur', atau 'mengurangi nilai', dan 'menjadi tidak berguna'. Teori Anomie merupakan teori yang menegaskan adanya ketidaksesuaian antara sebuah harapan dengan kondisi yang terjadi dengan sebenarnya. Durkheim, atau Emile Durkheim sebagai seorang bapak sosiologi Perancis, mendefinisikan teori anomie sebagai teori yang membahas tentang sebuah keterasingan yang dialami oleh individu dalam lingkungan masyarakatnya. Pemberantasan korupsi tidak seperti hanya membalikkan telapak tangan, tentunya memerlukan upaya yang "istimewa". Salah satu cara menangani perkara korupsi dengan upaya preventif yaitu dapat melalui Pendidikan yaitu Pendidikan anti korupsi

Kata Kunci: Korupsi, Teori Anomie, Perkara

Abstract

*Corruption is one of the many unresolved problems that critically hinders development. Etymologically, the term corruption comes from the Latin *corrumpo* which means to become 'rotten', 'destroyed', or 'reduces value', and 'becomes useless'. Anomie theory is a theory that emphasizes the existence of a discrepancy between expectations and conditions that actually occur. Durkheim, or Emile Durkheim as the father of French sociology, defined the theory of anomie as a theory that discusses the alienation experienced by individuals in their social environment. Eradicating corruption is not like just turning the palm of your hand, of course it requires "special" efforts. One way to handle corruption cases with preventive efforts is through education, namely anti-corruption education.*

Keywords: anomie theory, corruption, cases

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan zaman yang cukup pesat memberikan pengaruh yang cukup besar. Pengaruh besar tersebut memberikan dampak yang besar terhadap berbagai perubahan sosial budaya yang terjadi pada zaman sekarang. Salah satunya adalah tindakan atau perbuatan kejahatan atau yang biasa kita sebut dengan tindakan kriminalitas. Kejahatan disebabkan oleh banyak faktor, antara lain ekonomi, pergaulan, dan peluang yang ada. Menurut pandangan sosiologis, tindakan kejahatan merupakan satu diantara gejala sosial yang bersangkutan dengan tiap individu serta masyarakat disekitarnya. Menurut kriminolog Muhammad, kejahatan merupakan suatu proses perilaku yang dilakukan dan merugikan masyarakat dan suatu perilaku yang menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat. Salah satu ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai kejahatan yaitu E. Durkheim seorang pakar sosiologi menyatakan kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan bahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri setiap masyarakat adalah dinamis. Kejahatan yang terjadi di



masyarakat berdampingan erat dengan kehidupan manusia, maka masyarakat akan merasa dirugikan dengan adanya kejahatan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai dan norma merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Nilai memegang peranan penting karena nilai-nilai menjadi orientasi dalam setiap tindakan melalui interaksi sosial serta menjadi sumber dinamika masyarakat. Jika terdapat perbuatan seseorang yang melawan nilai, norma ataupun hukum akan diberikan hukuman yang diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap seseorang yang melakukannya. Hukuman berfungsi untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang serupa. Akan tetapi, tidak sedikit dari pelaku kejahatan melakukan perbuatan yang sama sehingga hukuman yang dijatuhan akan lebih berat dari sebelumnya. Karena hukuman yang dijatuhan tidak begitu memberikan efek jera maka pelaku nekat untuk melakukan kejahatan yang sama. Seperti contohnya yaitu Korupsi

Pembenaran sistem umum dapat menyebabkan orang menyangkal korupsi yang meluas dan menganggap korupsi sebagai kasus satu kali yang melibatkan hanya beberapa orang. Justifikasi sistem secara umum meredam kepekaan terhadap meluasnya ketidakadilan sosial. Banyak orang korupsi yang bertujuan semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, untuk menemukan penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana memerlukan suatu penyelidikan penting yang dapat dilakukan dengan menggunakan teori kriminologi. Kasus korupsi bukan merupakan hal baru yang baru kita dengar. Setiap tahun, kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat dan tak terkendali. Korupsi adalah salah satu dari banyak masalah yang belum terselesaikan yang secara kritis menghambat pembangunan. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corrumpo* yang berarti menjadi 'busuk', 'hancur', atau 'mengurangi nilai', dan 'menjadi tidak berguna'. Korupsi adalah masalah multidimensi di hampir seluruh negara berkembang. Korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dalam masyarakat bersifat kompleks karena membahayakan ekonomi, politik, sosial negara, struktur budaya, dan merusak kepercayaan publik, yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang atas sesuatu. Sektor publik diargetkan oleh negara untuk melayani masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi sektor ini sering menjadi sasaran para koruptor untuk mencapai tujuan pribadinya. Ciri yang mencolok dari korupsi adalah perbuatan tersebut dilakukan semata-mata untuk keuntungan pribadi, memperoleh dan merugikan pihak lain selain diri sendiri.

Dalam kriminologi, terdapat teori-teori yang dapat membantu untuk memahami mekanisme fungsional sistem peradilan pidana dan pemegang peran dalam sistem peradilan. Teori dapat memberikan solusi bagaimana memecahkan suatu masalah dalam konteks kriminologi, asumsi yang dikembangkan adalah makna dari tindakan tertentu yang dirasakan sendiri oleh seorang penjahat setelah berinteraksi dengan kelompoknya atau masyarakat sekitarnya yang mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memahami. Pengkajian secara kritis untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Teori ini diperlukan untuk mengkaji mengapa ada manusia yang mampu melaksanakan norma sosial dan norma hukum, tetapi ada juga manusia yang justru melanggarinya. Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana karena menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap jahat oleh masyarakat

Salah satu teori nya yaitu Teori Anomi. Teori anomie dikemukakan oleh Sosiolog Perancis, Emile Durkheim (1858-1917). Durkheim menggunakan istilah anomie untuk menyebut suatu kondisi yang mengalami deregulasi. Menurutnya perubahan sosial yang cepat dan mencekam dalam masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap semua kelompok dalam masyarakat. Durkheim menggambarkan konsep anomie sebagai kondisi dalam masyarakat yang terjadi keputusasaan atau ketiadaan norma. Anomi juga merupakan akibat perubahan bermasyarakat yang cepat. Anomi ada pada tiap-tiap masyarakat dan menjelma bukan hanya dalam bentuk kejahatan tetapi juga dalam kasus bunuh diri. Semua



ini terjadi karena ketidakhadiran norma-norma sosial, dan ketiadaan pengawasan sosial yang dapat mengendalikan perilaku menyimpang. Korupsi bukan hanya sebuah platform untuk menampilkan hak istimewa dan melestarikan manfaat yang tidak proporsional dari yang dominan, tetapi juga perilaku yang umumnya merugikan stabilitas nasional dan keamanan global dan mengancam masyarakat umum

Adanya kasus korupsi ini bisa ditangani dengan upaya preventif yaitu dapat melalui Pendidikan yaitu Pendidikan anti korupsi. Pendidikan adalah suatu upaya untuk memberikan perubahan dalam membentuk manusia yang mempunyai kecakapan mumpuni yaitu pada emosional, intelektual dan spiritual. Pendidikan ini berdampak sangat besar untuk mempersiapkan remaja dan masyarakat untuk unggul dan berkarakter

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan Teori Anomie yaitu mengenai Tindak Pidana Korupsi yang masih banyak terjadi di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahaya Korupsi Bagi Negara

Apabila korupsi dalam suatu negara sudah tidak dapat dihindari dan terus bertambah setiap harinya, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain. Dampak negatif yang paling berbahaya akibat korupsi yaitu rusaknya generasi muda. Generasi muda akan menganggap korupsi yang masih sering terjadi sebagai sesuatu yang lumrah, ini dapat mengakibatkan perkembangan generasi muda terganggu dengan sifat tidak bertanggung jawab dan tidak jujur. Jika generasi penerus bangsa saja setiap harinya dihadapi dengan korupsi yang tidak ada habisnya, maka masa depan negara pun akan suram

Terlebih bahaya, apabila kekuasaan politik, pemerintahan dan pemimpin masyarakat terlibat korupsi, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat.

Tidak hanya merusak generasi penerus bangsa dan politik, Korupsi juga dapat merusak ekonomi negara. Jika suatu projek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan projek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana projek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam projek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari projek tersebut tidak akan tercapai. Apabila korupsi terus terjadi, otomatis keuangan negara juga ikut terkena akibat. Keuangan negara menjadi tidak stabil yang mengakibatkan proyek atau rencana negara menjadi batal bahkan gagal

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.

Adanya korupsi ini yang semakin merajalela menyebabkan masyarakat menjadi korban yang dimana kesejahteraan yang diharuskan diberikan kepada masyarakat malah direnggut oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat juga terganggu dengan adanya korupsi ini, hal ini karena korupsi telah masuk ke Lembaga eksekutif dan legislatif dan pejabat public serta politisi. Adanya korupsi yang ada di Indonesia ini memerlukan paying hukum yang jelas untuk



memerangi adanya korupsi yang semakin melebar. Adanya faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia diantaranya seperti hukum itu sendiri, penegakan hukum, sarana serta fasilitas, masyarakat dan kebudayaan

Keterkaitan Korupsi Bagi Negara dengan Teori Anomie

Teori Anomie merupakan teori yang menegaskan adanya ketidaksesuaian antara sebuah harapan dengan kondisi yang terjadi dengan sebenarnya. Durkheim, atau Emile Durkheim sebagai seorang bapak sosiologi Perancis, mendefinisikan teori anomie sebagai teori yang membahas tentang sebuah keterasingan yang dialami oleh individu dalam lingkungan masyarakatnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya pembagian kelas yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Teori anomie yang membahas tentang penyimpangan atas ketidakseimbangan nilai serta norma yang ada dalam masyarakat, sehingga kecenderungan terjadinya sebuah penyimpangan menjadi ada, bahkan tinggi.

Terdapat teori - teori yang menggabungkan sebab-sebab terjadinya kejahatan (korupsi). Teori Anomie yang dikemukakan oleh Emile Durkheim menjelaskan bahwa anomie terjadi sebagai bentuk hilangnya standar dan nilai akibat runtuhnya tatanan sosial. Konsep asli Durkheim tentang anomie telah ditafsirkan ulang selama abad yang lalu, dengan ilmuwan sosial yang meningkatkan dan menerapkan konsep anomie ke banyak pengaturan makro sosial yang berbeda. Lunturnya nilai – nilai kehidupan dan nasionalisme membuat korupsi dianggap biasa, seperti yang sudah banyak dilakukan oleh para koruptor-koruptor yang berhasil dikuak tindakan korupsinya. Terdapat pula teori Psikoanalitik yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yang menyatakan bahwa perilaku kriminal disebabkan oleh hati nurani yang goyah dan tidak dapat menahan dorongan keinginan atau hasrat yang kuat seperti keinginan akan kekayaan, kemudahan dan kemewahan meskipun diperoleh dengan cara yang tidak sah.

Dalam pembahasan yang dibahas oleh Durkheim, terdapat suatu tujuan yang dipelihara oleh masyarakat, dimana didalamnya masyarakat pun diperbolehkan untuk mengubah sarana-sarana yang digunakan dalam mendapatkan tujuannya. Dalam penerapannya, masyarakat dengan uang sebagai tujuannya dapat diraih dengan menabung, namun tujuan tersebut juga dapat dicapai dengan cara merampok.

Korupsi merupakan suatu penyimpangan yang belum bisa diatasi oleh negara. Semakin hari tingkat korupsi di Indonesia semakin bertambah. Hal ini tentu berkaitan dengan teori yang menegaskan adanya ketidaksesuaian antara sebuah harapan dengan kondisi yang terjadi dengan sebenarnya. Korupsi di Indonesia yang cenderung terjadi yaitu untuk menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan uang rakyat. Lantas harus percaya siapa lagi, jika wakil rakyat, kepala daerah dan pejabat tidak amanah dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka.

Korupsi tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut dengan kekuasaan. Di mana ada kekuasaan, pasti ada korupsi. Kekuasaan dan korupsi selalu hidup berdampingan di kedua sisi uang yang sama dan merupakan inti dari apa yang dikatakan oleh University of Cambridge Lord Acton yaitu "Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korupsi. Di Indonesia, ini terjadi di era orde baru. Di sisi lain, jika pemerintahan suatu negara didesentralisasi, misalnya jika didesentralisasi, korupsi juga akan berlipat ganda sejalan dengan kebijakan pemerintah yang didesentralisasi. Dengan kata lain, korupsi juga terjadi di tingkat pemerintah daerah. Ketika kekuasaan berpindah dari satu pusat kekuasaan ke banyak pusat kekuasaan otonom, korupsi mengikuti transisi dari satu pusat kekuasaan ke banyak pusat kekuasaan. Situasi ini terjadi di Indonesia saat ini.

Perlu diketahui kasus korupsi di Indonesia merupakan skala besar yang mana bentuk korupsi berat yang dapat merugikan bangsa dan masyarakat secara keseluruhan. Perkara korupsi seringkali dikaitkan dengan masalah kekuasaan. Para pejabat dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk melakukan tindakan ilegal demi keuntungan pribadi. Pejabat yang berwenang secara otomatis memiliki kekuasaan untuk memengaruhi kebijakan yang telah diatur.



Pemberantasan korupsi tidak seperti hanya membalikkan telapak tangan, tentunya memerlukan upaya yang "istimewa". Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa pemberantasan korupsi tidak lagi dapat dilakukan dengan perilaku atau pemikiran biasa, melainkan perlu tindakan dan pemikiran yang luar biasa. Oleh karena itu, keberanian penegak hukum perlu diperkuat untuk melakukan proses hukum, berdamai dengan keadilan hukum, dan menerima putusan luar biasa. Andy Hamzah juga berpendapat bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan upaya lebih dari sekadar reformasi hukum. Tidak cukup untuk mengurangi kejahatan dengan kekerasan saja, maka dari itu perlu diketahui lebih dalam lagi penyebab kejahatan sehingga dapat menguranginya dengan upaya-upaya lain.

Salah satu cara menangani perkara korupsi dengan upaya preventif yaitu dapat melalui Pendidikan yaitu Pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan hal yang penting yang dimana sebagai ujung tombak untuk memberantas adanya korupsi yang ada di bangsa ini. Tujuan dari negara sulit tercapai jika korupsi masih ada sampai sekarang ini, maka dari itu di perlukannya Pendidikan anti korupsi untuk mencapai tujuan dari negara ini. Tujuan negara ini ada mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi, untuk mewujudkan Pendidikan anti korupsi, pelajar atau mahasiswa harusnya mempelajari moral action, hal ini dilakukan agar memiliki kebiasaan dan kemampuan untuk bisa mewujudkan dalam nilai-nilai sehari hari.

KESIMPULAN

Korupsi adalah salah satu dari banyak masalah yang belum terselesaikan yang secara kritis menghambat pembangunan. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa latin corrumpto yang berarti menjadi 'busuk', 'hancur', atau 'mengurangi nilai', dan 'menjadi tidak berguna'. Ciri yang mencolok dari korupsi adalah perbuatan tersebut dilakukan semata-mata untuk keuntungan pribadi, memperoleh dan merugikan pihak lain selain diri sendiri. Korupsi dapat menimbulkan bahaya bagi negara. Dampak negatif yang timbul akibat korupsi yaitu rusaknya generasi muda. Apabila kekuasaan politik, pemerintahan dan pemimpin masyarakat terlibat korupsi, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Korupsi juga dapat merusak ekonomi negara dan menyebabkan tidak efisiennya birokrasi.

Teori Anomi merupakan teori yang menegaskan adanya ketidaksesuaian antara sebuah harapan dengan kondisi yang terjadi dengan sebenarnya. Durkheim, atau Emile Durkheim sebagai seorang bapak sosiologi Perancis, mendefinisikan teori anomie sebagai teori yang membahas tentang sebuah keterasingan yang dialami oleh individu dalam lingkungan masyarakatnya. Konsepsi asli Durkheim tentang anomie telah ditafsirkan ulang selama abad yang lalu, dengan ilmuwan sosial yang meningkatkan dan menerapkan konsep anomie ke banyak pengaturan makro sosial yang berbeda.

Korupsi merupakan suatu penyimpangan yang belum bisa diatasi oleh negara. Semakin hari tingkat korupsi di Indonesia semakin bertambah. Hal ini tentu berkaitan dengan teori yang menegaskan adanya ketidaksesuaian antara sebuah harapan dengan kondisi yang terjadi dengan sebenarnya. Korupsi tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut dengan kekuasaan. Di mana ada kekuasaan, pasti ada korupsi. Pemberantasan korupsi tidak seperti hanya membalikkan telapak tangan, tentunya memerlukan upaya yang "istimewa". Salah satu cara menangani perkara korupsi dengan upaya preventif yaitu dapat melalui Pendidikan yaitu Pendidikan anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguilera, R. V., & Vadera, A. K. The dark side of authority: Antecedents, mechanisms, and outcomes of organizational corruption. *Journal of Business Ethics*, 77(4), 431–449.
<https://doi.org/10.1007/s10551-007-9358-8>, 2008
- A.S. Alam dan Amir. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2018
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Eresco, 1992



- Feygina, I., Goldsmith, R. E., & Jost, J. T. *System Justification and the Disruption of Environmental Goal-Setting: A Self-Regulatory Perspective. Self Control in Society, Mind, and Brain.* <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195391381.003.0026>, 2010
- Mustofa, M. *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, 2010
- Tan, X., Liu, L., Huang, Z., Zheng, W., & Liang, Y. *The effects of general system justification on corruption perception and intent. Frontiers in Psychology*, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.0110>, 2016
- Weda, Made Darma. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.